BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan Kerja Praktek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, penulis berada di bagian Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, Seksi Ekspor Non Industri.

Berdasarkan pada judul Laporan Kerja Praktek yang diambil oleh penulis, penulis mendapat kesempatan berada langsung di bawah bimbingan Pimpinan Pelaksana Kegiatan, yang pada saàt itu Seksi Ekspor Non Industri ini sedang mengadakan Program dengan tajuk Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, dengan Kegiatan yang bernama, Kegiatan Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah Kab./Kota. Disini selain penulis mempelajari tentang prosedur Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), penulis juga diberikan kesempatan untuk melihat, mempelajari, hingga praktek mengaudit Buku Kas Umum (BKU) yang dalam hal ini penulis berada di bawah bimbingan Kasir Kegiatan.

Selain pada bagian Seksi Ekspor Non Industri, penulis juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan Kerja Praktek pada Seksi Ekspor Hasil Industri, di Seksi ini penulis hanya memproses dan mempelajari prosedur-prosedur Dokumen Ekspor.

Dengan adanya Kerja Praktek ini, penulis bisa lebih mengetahui dan memahami ataupun mempelajari tugas-tugas dan fungsi-fungsi dari setiap Seksi di

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, khususnya di Seksi Ekspor Non Industri dimana penulis melaksanakan Kerja Praktek.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama melaksanakan Kerja Praktek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, Seksi Ekspor Non Industri, penulis ditempatkan pada Bagian Keuangan pada Kegiatan Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah Kab./Kota. Sebelum melaksanakan Kerja Praktek penulis diberi pengarahan dan penjelasan tentang ruang lingkup kegiatan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, khususnya kegiatan yang ada pada Seksi Ekspor Non Industri.

Setelah diberikan pengarahan dan penjelasan tersebut diatas, kemudian penulis melaksanakan Kerja Praktek pada bagian yang telah ditentukan, yaitu di bagian Seksi Ekspor Non Industri dimana teknis pelaksanaan Kerja Praktek tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada minggu pertama pelaksanaan Kerja Praktek, penulis bekerja langsung dibawah bimbingan Pimpinan Pelaksana (Pimlak) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah Kab./Kota, yang dalam hal ini tugas penulis adalah penyelesaian administrasi yang terdiri dari surat-surat dinas dan hasil evaluasi kegiatan.
- Pada minggu kedua penulis melaksanakan Kerja Praktek, yang dititik beratkan pada Bagian Keuangan dalam Kegiatan Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor daerah Kab./Kota, yang dalam hal ini penulis mendapat kepercayaan untuk melakukan pemeriksaan awal

terhadap Buku Kas Umum (BKU) yang hasil akhir dari pemeriksaan ini langsung dilaporkan kepada Kepala Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri. Dan selain itu, penulis juga sempat diberi kesempatan untuk peninjauan lapangan secara langsung ke lokasi dalam rangka Kegiatan Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah kab./Kota.

- Pada minggu ketiga pelaksanaan Kerja Praktek, penulis menyelesaikan proses-proses administrasi dari Kegiatan Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah Kab./Kota. Hal ini dimulai dengan menyelesaikan laporan Kegiatan dan Laporan pertanggung jawaban keuangan. Selain itu, penulis juga diberikan kesempatan untuk masuk ke Seksi Ekspor Hasil Industri, dalam hal ini penulis mempelajari, memasukkan data Prosedur Ekspor yang biasa dikenal dengan Surat Keterangan Asal (SKA) dengan Sistem Komputerisasi.
- Pada minggu keempat atau minngu terakhir pelaksanaan Kerja Praktek, penulis mulai mengumpulkan data dan informasi tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). Penulis melakukan wawancara langsung baik itu dengan Pimpinan Pelaksana Kegiatan, Kasir Kegiatan, Kepala Seksi Ekspor Non Industri, serta para Pegawai lainnya yang terkait. Tapi meskipun demikian, penulis melakukan wawancara lebih intensifnya dengan Pimpinan Pelaksana Kegiatan. Begitu juga dengan proses pengumpulan data, penulis lebih terfokus pada Pimpinan Pelaksana Kegiatan dan Kasir Kegiatan.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat

Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) adalah merupakan suatu dokumen yang digunakan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja oleh Dinas/Lembaga/Badan. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ini memuat informasi Dinas/Lembaga/Badan yang dapat meliputi Tugas Pokok dan Fungsi, Bidang Kewenangan, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Target Program, Kegiatan dan Usulan Anggaran Dinas/Badan/Lembaga.

Secara umum rincian Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan informasi yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

Kode Formulir	Informasi Pokok	Keterangan
S1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja	-
S2	Bidang Kewenangan, Program, Kegiatan	-
S2A	Program Kegiatan	-
S3	Ringkasan Anggaran	Kode Rekening, Uraian, Jumlah
S3A	Rekapitulasi Anggaran Pendapatan	Kode Rekening, Uraian, Jumlah
S3A1	Anggaran Pendapatan per Kegiatan	Kegiatan, Tolak Ukur dan Target Kinerja, Indikator, Masukan, Keluaran, Hasil, Manfaat, Dampak, Kode Rekening, Uraian, Jumlah

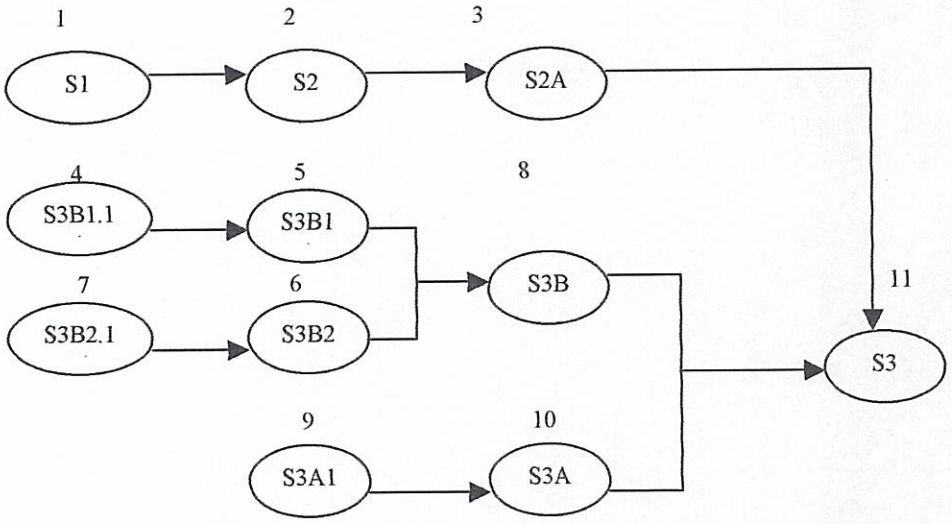
S3B	Rekapitulasi Anggaran Belanja	Kode Rekening, Uraian Jumlah
S3B1	Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung	Kode Rekening, Uraian Jumlah
S3B1.1	Anggaran Belanja Langsung per Kegiatan	Kegiatan, Tolak Ukur, dan Target Kinerja, Indikator Masukan, Keluaran, Hasil, Manfaat, Dampak, Kode Rekening, Uraian, Jumlah
S3B2	Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Langsung	Kode Rekening, Uraian, Jumlah
S3B2.1	Anggaran Belanja Tidak Langsung per Kegiatan (Alokasi)	Kode Rekening, Uraian, Jumlah

Prosedur Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) adalah merupakan serangkaian urutan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas/Lembaga/Badan. Prosedur ini dilakukan oleh Dinas/Lembaga/Badan untuk diajukan kepada Kepala Daerah c.q Tim Penyusun Anggaran (TPA).

Dan untuk memperjelas tahapan prosedur Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) adalah sebagai berikut :

1. Dinas/Lembaga/Badan menerima Surat Edaran Kepala Daerah untuk mengisi Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang dilampiri Arah dan Kebijakan Umum APBD, Rencana Strategis Daerah (Renstrada), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).

2. Dinas/Lembaga/Badan mengisi Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD, Renstra, Repetada. Adapun urutan pengerjaannya adalah sebagai berikut :



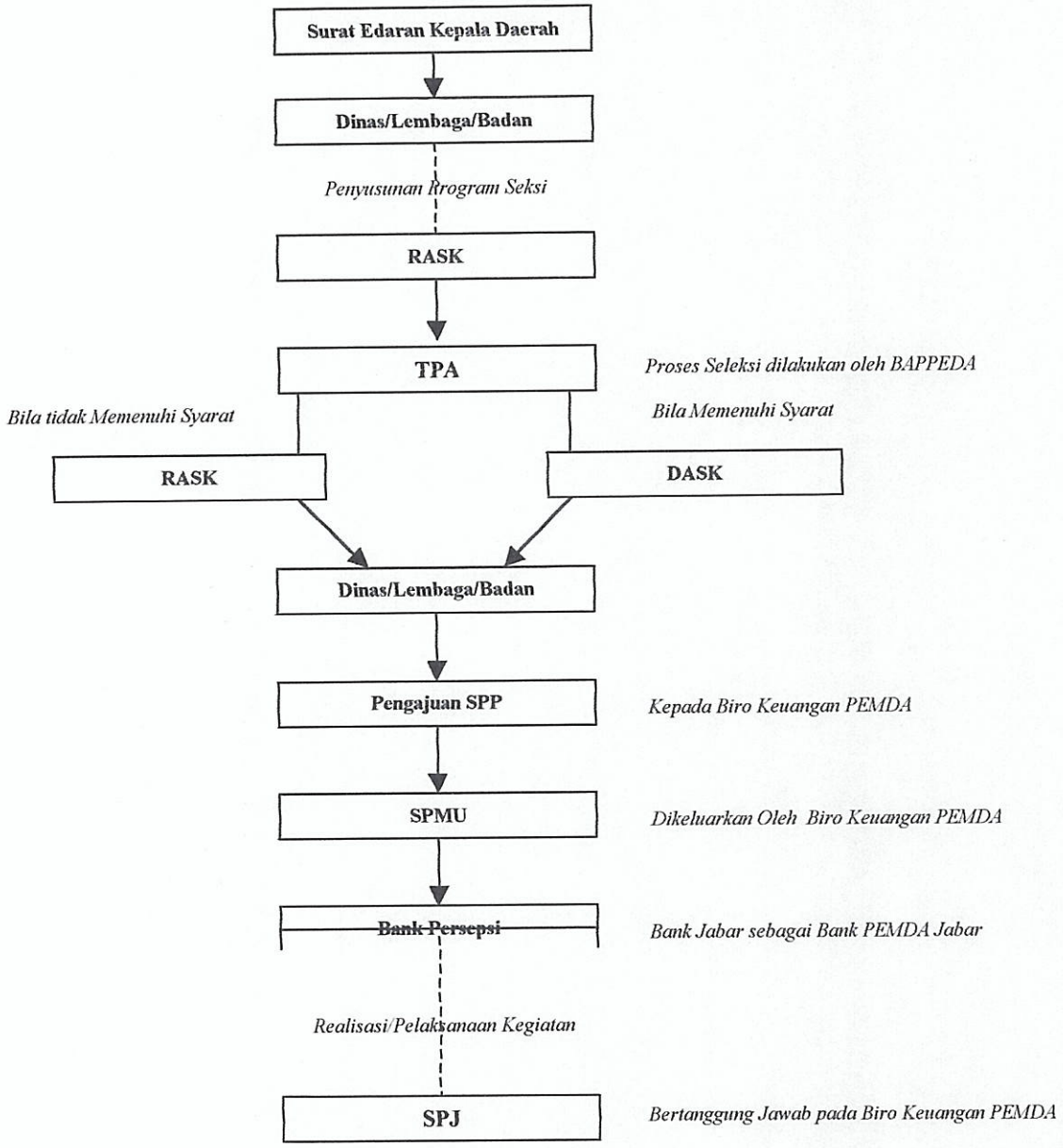
3. Dinas/Lembaga/Badan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang sudah diisi kepada Kepala Daerah c.q Tim penyusun Anggaran (TPA) untuk diseleksi. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang telah memenuhi syarat akan dijadikan bahan dalam penyusunan APBD, sedangkan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Dinas/Badan/Lembaga untuk disempurnakan.
4. Dinas/Badan/Lembaga menerima Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang tidak memenuhi persyaratan untuk disempurnakan dan disampaikan kembali kepada Kepala Daerah c.q Tim Penyusun Anggaran (TPA).

Apabila rangkaian urutan prosedur Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tersebut dibuat kedalam sebuah bagan alir, yang khususnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, Sub Dinas Perdagangan Luar

Negeri, Seksi Ekspor Non Industri dimana penulis melaksanakan Kerja Praktek, maka penulis dapat menyajikan dengan bagan alir sebagai berikut :

(*Gambar ada di halaman selanjutnya*)

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM



Keterangan :

RASK : Rencana Anggaran Satuan Kerja
TPA : Tim Penyusun Anggaran
DASK : Dokumen Anggaran Satuan Kerja
SPP : Surat Permintaan Pembayaran
SPMU : Surat Perintah Membayar Uang yang harus dipertanggung jawabkan
SPJ : Surat Pertanggung Jawaban

Agar lebih jelas dan rincinya penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut :

Langkah awal dalam pembuatan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yaitu dimulai dengan adanya Surat Edaran dari Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Gubernur Propinsi Jawa Barat. Setelah Surat Edaran tersebut diterima oleh Dinas/Badan/Lembaga yang dalam hal ini diterima oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat yang kemudian diteruskan kepada Kepala Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, dan selanjutnya diberikan kepada Kepala Seksi Ekspor Non Industri dan kemudian berlangsung pembentukan panitia dan perencanaan Program Seksi, dalam perencanaan Program Seksi tersebut dikenal dengan istilah Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).

Jika perencanaan tersebut telah selesai maka hasil perencanaan tersebut diserahkan kepada Tim Penyusunan Anggaran yang dalam hal ini diserahkan kepada BAPPEDA untuk diproses lebih lanjut. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) tersebut ada yang disetujui atau tidak disetujui, dan kedua-duanya dikembalikan lagi kepada Dinas/Badan/Lembaga dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang telah disetujui akan menjadi sebuah dokumen yang dinamakan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

Kemudian pihak Dinas/Badan/Lembaga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Biro Keuangan PEMDA Jawa Barat. Setelah ditanggapi oleh pihak Biro Keuangan PEMDA Jawa Barat dengan dikeluarkannya Surat Perintah Membayar Uang Yanng Harus Dipertanggung Jawabkan (SPMU).

Selanjutnya pihak Dinas/Badan/Lembaga dapat menguangkan SPMU tersebut kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemda yang dalam hal ini adalah Bank Jabar.

Setelah uang didapatkan oleh pihak Dinas/Badan/Lembaga, maka pelaksanaan Kegiatan bisa segera dilangsungkan. Kegiatan demi Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantumkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). Dan disetiap akhir periode dilaksanakan laporan pertanggung jawaban, dengan dikeluarkannya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) oleh Dinas/Badan/Lembaga, yang diperuntukkan Biro Keuangan PEMDA.

3.3.2 Faktor-Faktor Utama diadakannya Kegiatan Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah Kab./Kota

Kegiatan Pengembangan Komoditas Ekspor Daerah Kab./Kota merupakan Kegiatan utama dari Seksi Ekspor Non Industri yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, khususnya Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, Seksi Ekspor Non Industri mempunyai alasan yang kuat untuk mengadakan Program dan Kegiatan ini. Yang mana alasan tersebut didukung oleh kenyataan lesunya perekonomian Indonesia umumnya dan Propinsi Jawa Barat khususnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, khususnya Sub Dinas Luar Negeri, Seksi Ekspor Non Industri memandang bahwasannya pembangunan dibidang ekonomi secara nasional yang telah dibangun selama kurang lebih 32 tahun ternyata masih sangat rapuh untuk menghadapi gejolak

negatif dari ekonomi yang salah satunya adalah krisis moneter yang sudah melanda Indonesia sejak tahun 1997 hingga sekarang tidak pernah kunjung selesai. Salah satu penyebab utama anjloknya perekonomian nasional akibat krisis tersebut adalah terabaikannya pembangunan ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya memiliki keunggulan yang sebanding dan bersaing, karena berbasis pada sumber daya nasional.

Kelemahan pembanguan industri saat itu diantaranya adalah belum sepenuhnya berbasis pada potensi unggulan daerah, kurangnya keterkaitan antar industri besar; industri menegah; dan industri kecil, tingginya tingkat ketergantungan bahan baku dan bahan penolong impor, kurangnya pengembangan industri pendukung, serta belum kokoh dan seimbangnya struktur industri antara hulu dan hilir.

Begitu juga kelemahan pembangunan perdagangan, antara lain terlihat dari tidak berjalannya mekanisme pasar akibat ikut campurnya pemerintah yang terlalu tinggi yang menyebabkan pembelokan fungsi dan peranan pasar, panjangnya mata rantai distribusi yang menyebabkan ketidakefisienan, kurangnya antisipasi terhadap perubahan lingkungan strategis perdagangan Internasional, serta belum terkoordinasikannya jaringan informasi pasar secara baik.

Dari kedua cakupan faktor utama yang bermasalah dan terpuruk dan juga sangat terkait erat dengan urusan Dinas yaitu Industri dan Perdagangan, maka akhirnya pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, khususnya Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, Seksi Ekspor Non Industri mengadakan suatu Program yang bertajuk, Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dengan nama Kegiatan, Kegiatan Pengembangan Pemasaran

Komoditas Ekspor Daerah Kab./Kota, yang dalam hal ini diharapkan bisa mengatasi masalah-masalah yang sudah diuraikan diatas.

3.3.3 Realisasi atau Aksi yang dilakukan dalam rangka Kegiatan Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daearah Kab./Kota

Aksi atau reaksi ini sangat berhubungan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, khusunya Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, Seksi Ekspor Non Industri untuk mengadakan suatu Program yang bertajuk Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, dengan nama Kegiatan, Kegiatan Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah Kab./Kota.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN

Atas dasar permasalah yang ada dan yang sedang dihadapi oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, khusunya Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, Seksi Ekspor Non Industri dan mengacu pada : Strategi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dalam rangka Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2001-2005, Hasil-hasil Rapat Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2002, Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat (PROPEDA) tahun 2001-2005, FKT Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (Bali-Solo 2002), Forum Konsultasi Dinas Indag se-Jawa Barat 2002, maka pembanguan sektor industri dan perdagangan di Jawa Barat diarahkan pada upaya mempercepat pemulihan ekonomi untuk membangkitkan sektor riil melalui kebijaksanaan :

Pemerintah (Pusat) ;

1. Peningkatan Kinerja Ekspor

2. Peningkatan Utilisasi Kapasitas Produksi
3. Pengembangan UKM-indag
4. Pendekatan Klaster Industri

Daerah ;

1. Pengembangan 6 Core Bisnis (SEKTORAL)
2. Pengembangan Kawasan Andalan (RUTRW)
3. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Sedangkan untuk aksi lapangan secara riil yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, khusunya Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, Seksi Ekspor Non Industri, adalah melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan Panitian Pelaksana Kegiatan.
2. Peleksanaan Temu Wicara, Temu Bisnis dan Seminar-seminar yang terkait erat dengan Pemasaran Produk-Produk Unggulan Daerah, untuk dijadikan Komoditas Ekspor yang berlokasi di 9 Kabupaten/Kota (Depok, Bekasi, Cianjur, Karawang, Cirebon, Bogor, Majalengka, Purwakarta dan Bandung).
3. Pemberian bantuan peralatan produksi berupa : Komputer, Mesin Jahit, Perlengkapan Menjahit, Faximile untuk Koperasi Pondok Pesantern di 15 Kab./Kota.
4. Pengadaan Promosi, Sponsorisasi dan juga Fasilitasi untuk pengenalan Produk-Produk Unggulan Daerah ke Luar Negeri (Malaysia dan Singapura).

Maka dengan adanya aksi atau realisasi lapangan dan juga didukung oleh kebijaksanaan pembangunan Industri dan Perdagangan yang telah diuraikan diatas, maka pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, khusunya Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, Seksi Ekspor Non Industri mengharapkan dapat mengatasi segala masalah dan juga kendala perekonomian secara nasional pada umumnya dan Jawa Barat pada khususnya.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM